

LAPORAN
PENELITIAN MANDIRI



**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI
PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

- 1. FITRIANI, M.A.P
NIDN. 1107058904**
- 2. MITA SARI, S.Sos.,M.A.P
NIDN 1104129301**
- 3. ARAFAT, M.A.P
NIDN 1117027402**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MEI 2025**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN MANDIRI**

Judul Penelitian : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Nama Ketua Peneliti : Fitriani, M.A.P

NIDN : 1107058904

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Administrasi Publik

Nomor HP : 082251372122

Alamat email : fitriani@umpr.ac.id

Nama Anggota 1 : Mita Sari, S.Sos., M.A.P

Program Studi : Administrasi Publik

Nama Anggota 2 : Arafat, M.A.P

Program Studi : Administrasi Publik

Palangka Raya, 26 Mei 2025

Mengetujui,
Keprodi Administrasi Publik,

Arafat, S.Sos., M.A.P
NIK. 20.0101.008

Ketua Peneliti,


Fitriani, M.A.P
NIDN. 1107058904

Menyetujui,
Kepala LP2M UMPR

Dr. M. Rizki Fadhil Pratama, M.Si
NIK. 15.0602.042

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III METODE PENELITIAN	8
<i>a. Jenis Penelitian.....</i>	8
<i>b. Metode Pengumpulan Data.....</i>	8
<i>c. Sumber Data.....</i>	8
<i>d. Metode Analisis Data</i>	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
BAB V KESIMPULAN	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial merupakan fenomena yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Salah satu persoalan sosial yang cukup kompleks adalah keberadaan pengemis. Keberadaan pengemis bukan sekadar gangguan ketertiban umum, tetapi juga merupakan refleksi dari kondisi ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan gagalnya sistem perlindungan sosial yang inklusif. Masalah ini menuntut perhatian serius karena menyangkut harkat dan martabat manusia.

Di berbagai kota besar di Indonesia, pengemis sering kali menempati ruang publik seperti pasar, persimpangan jalan, tempat ibadah, dan lokasi wisata. Keberadaan mereka menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. Ketimpangan sosial yang melahirkan kondisi ini mencerminkan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan pelayanan sosial dasar. Maka, menangani pengemis tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan penertiban, melainkan memerlukan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemulihan martabat sosial.

Fenomena keberadaan pengemis di kota-kota besar maupun kecil di Indonesia, termasuk Kota Palangka Raya, merupakan permasalahan sosial yang kompleks. Meskipun jumlah pengemis mungkin tidak sebanyak di kota metropolitan, namun kehadiran mereka tetap menjadi sorotan masyarakat, terutama karena keberadaannya sering kali mengganggu ketertiban umum, estetika kota, serta menimbulkan citra negatif terhadap upaya pembangunan sosial di daerah tersebut. Pengemis umumnya berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan yang mengalami keterbatasan dalam hal pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap lapangan kerja. Namun demikian, tidak sedikit pula dari mereka yang menjadikan mengemis sebagai profesi karena dinilai lebih mudah dan menjanjikan secara ekonomi tanpa harus memiliki keahlian tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan satu-satunya faktor penyebab, melainkan juga adanya aspek psikososial dan budaya yang mempengaruhi.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Palangka Raya meski merupakan ibu kota provinsi dengan pertumbuhan pembangunan yang terus meningkat, Kota Palangka Raya masih menghadapi persoalan pengemis yang muncul di ruang publik. Menurut data Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2024, hanya tercatat 3 orang pengemis yang kebutuhan dasarnya

terpenuhi melalui program luar panti. Namun, angka tersebut sangat kecil dibandingkan dengan kenyataan di lapangan, di mana masih banyak pengemis yang beraktivitas setiap hari dan bahkan berasal dari luar daerah.

Kebijakan mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2012, yang berisi tentang penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Sosial telah meluncurkan program rehabilitasi sosial sebagai upaya penanganan yang bersifat jangka panjang. Program ini tidak hanya berfokus pada penertiban semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan melalui pemberian pelatihan keterampilan, bimbingan mental-spiritual, hingga reintegrasi sosial. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi para pengemis, keterbatasan fasilitas panti rehabilitasi, dan kurangnya pendamping sosial yang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah menjalankan Program Rehabilitasi Sosial dengan sasaran kelompok pengemis. Program ini ditujukan bagi orang-orang yang mengalami masalah sosial, termasuk pengemis agar mereka bisa keluar dari kehidupan di jalan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Program ini bertujuan memberikan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi kepada para pengemis agar mereka dapat hidup mandiri. Namun, sejauh mana program ini telah berjalan dengan efektif belum banyak dikaji secara mendalam. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengemis yang terjaring razia merupakan pengemis musiman yang datang dari luar daerah, dan tidak sedikit pula yang kembali mengemis setelah menjalani rehabilitasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi program rehabilitasi sosial yang telah dirancang. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi program ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program tersebut dijalankan sesuai dengan perencanaan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya bagi para penerima manfaat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi sosial bagi pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya, sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka mewujudkan kota yang lebih tertib, manusiawi, dan sejahtera.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang yang mengalami disfungsi sosial dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial, sehingga individu dapat hidup mandiri dan produktif di tengah masyarakat. Sementara itu, menurut Suharto (2005), rehabilitasi sosial merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk memulihkan kemampuan individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial agar dapat berfungsi kembali secara optimal dalam kehidupan sosialnya.

Menurut Departemen Sosial RI, pengemis adalah seseorang yang berada di tempat umum dan meminta-minta dengan berbagai cara untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengemis sering dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang merupakan kelompok sasaran utama dari intervensi sosial pemerintah. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis antara lain adalah kemiskinan, keterbatasan pendidikan, disfungsi keluarga, migrasi, hingga budaya dan kebiasaan hidup yang terbentuk sejak lama (Suyanto, 2012). Menurut Nugroho (2011), implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan, yang menghubungkan antara rumusan kebijakan dengan hasil yang dicapai. Implementasi yang baik memerlukan sinergi antara struktur organisasi, sumber daya, komunikasi, serta sikap para pelaksana kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (1983) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

- Karakteristik kebijakan itu sendiri,
- Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi,
- Kapasitas dan komitmen pelaksana kebijakan.

Program rehabilitasi sosial bagi pengemis umumnya dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari penjangkauan dan identifikasi, asesmen kebutuhan, pelatihan keterampilan (vokasional), layanan bimbingan mental dan spiritual, hingga penempatan atau reintegrasi sosial. Tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir dan perilaku pengemis agar memiliki

kemandirian dan tidak kembali ke jalanan. Menurut data Kementerian Sosial, pendekatan yang digunakan dalam rehabilitasi sosial bersifat holistik, dengan menekankan pada pemulihan fungsi sosial dan pelibatan aktif pihak keluarga serta komunitas dalam proses pemulihan.

Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah memiliki tugas utama dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial. Dalam konteks penanganan pengemis, Dinas Sosial berperan dalam:

- Menyusun program intervensi,
- Melakukan pendataan dan pengawasan,
- Memberikan layanan sosial langsung,
- Menjalin kerja sama dengan lembaga terkait, seperti LSM, balai latihan kerja, dan lembaga keagamaan.

Menurut Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Dinas Sosial wajib memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat miskin dan rentan, termasuk para pengemis, dalam bentuk rehabilitasi sosial dasar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif metode yang memfokuskan penelitian dengan menggambarkan fenomena yang sedalam-dalamnya dan menggali informasi sedalam-dalamnya dengan menggunakan kalimat atau kata-kata, dimana peneliti sendiri langsung berada di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya.

B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta dampak dari program tersebut terhadap para penerima manfaat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara:

1. Wawancara: Peneliti bertanya langsung kepada narasumber untuk mengetahui pendapat dan pengalaman mereka.
2. Observasi (pengamatan): Peneliti melihat langsung kegiatan atau proses dalam program.
3. Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dokumen atau arsip.

Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Pendamping sosial atau pekerja sosial dan Pengemis atau eks-pengemis.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana di peroleh (Sugiyono 2013 : 308) yaitu :

1. Sumber Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan

dan subyek penelitian di lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya dan Masyarakat terkait

2. Sumber Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data tersebut berasal dari bahan-bahan, baik berupa buku-buku, artikel, karya ilmiah yang di muat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar,serta jurnal ilmiah.

D. Metode analisis data

Dalam menganalisis data ada beberapa langkah yang harus ditempuh dengan berpedoman yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data dalam penelitian kualitatif adalah mencakup kegiatan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilihnya kedalam suatu konsep tertentu.

Pada reduksi data, data yang begitu banyak dan kompleks serta mungkin masih bercampur aduk yang di peroleh dari penelitian di tajamkan, diseleksi, digolongkan, diarahkan, dibuang yang tidak relevan dan di organisasikan dengan cara sedemikian rupa untuk pemecahan masalah atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data berwujud sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari analisis dengan maksud agar data atau informasi yang telah terkumpul dapat tersusun dalam bentuk grafik, jaringan dan bagan.

Pada penyajian data, di kembangkan format berupa ringkasan untuk menjelaskan dan menyederhanakan keragaman data agar menjadi lebih mudah.

3. Conclusion Drawing/ Verification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah berdasarkan data relevan yang di kumpulkan dan di tampilkan tersebut, kemudian di tarik suatu kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir penelitian, Sehingga data yang diambil tidak menyimpang dari data yang di peroleh atau dianalisa. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian secara konkrit sesuai dengan keadaan yang dilapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam menangani pengemis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Sosial, pendamping sosial, serta beberapa pengemis yang pernah mengikuti program. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pendataan pengemis, pembinaan mental, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan sosial. Program ini bertujuan agar para pengemis bisa berubah menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak lagi kembali ke jalan.

Berdasarkan hasil temuan dilihat dari Tingkat Partisipasi Pengemis dalam Program Rehabilitasi Sosial, maka data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya, hanya 3 orang pengemis yang tercatat menerima manfaat dari program rehabilitasi sosial pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan rendahnya partisipasi pengemis dalam program tersebut, mengingat jumlah pengemis yang ada di Kota Palangka Raya jauh lebih banyak. Rendahnya tingkat partisipasi pengemis dalam program rehabilitasi sosial menunjukkan adanya ketidakpercayaan atau ketidakminatan dari para pengemis terhadap program ini. Beberapa pengemis mungkin merasa bahwa program ini tidak memberikan solusi jangka panjang atau mereka merasa lebih nyaman hidup di jalan karena tidak memiliki dukungan sosial atau ekonomi yang memadai. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai manfaat jangka panjang dari program rehabilitasi juga menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang ada di Kota Palangka Raya sangat terbatas. Panti rehabilitasi tidak mampu menampung seluruh pengemis yang membutuhkan bantuan. Selain itu, jumlah pendamping sosial yang terbatas menyebabkan kualitas rehabilitasi menjadi kurang maksimal, karena pendamping sosial tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap pengemis. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan program secara maksimal. Selain itu, jumlah pendamping sosial yang terbatas menyebabkan program rehabilitasi tidak dapat diimplementasikan dengan optimal. Pendamping sosial memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi, baik dalam hal pembinaan keterampilan maupun dalam memberikan dukungan psikososial.

Banyak pengemis yang terjaring dalam program rehabilitasi adalah pengemis musiman yang datang dari luar daerah. Pengemis jenis ini hanya berada di Palangka Raya untuk waktu yang singkat dan tidak memiliki ikatan sosial yang kuat di kota tersebut, sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka menjadi sulit. Karena mereka hanya berada dalam jangka waktu tertentu, program rehabilitasi menjadi kurang efektif untuk membantu mereka keluar dari kehidupan mengemis secara permanen. Mereka sering kali kembali mengemis setelah musim berlalu, yang mengindikasikan bahwa program rehabilitasi belum mampu menyentuh akar masalah pengemis musiman ini secara komprehensif.

Program rehabilitasi menyediakan pelatihan keterampilan bagi pengemis, namun banyak dari mereka yang tidak dapat memanfaatkan keterampilan yang dipelajari karena terbatasnya peluang kerja yang layak di Kota Palangka Raya. Selain itu, pengemis yang telah dilatih sering kali tidak memiliki modal atau jaringan sosial untuk memulai usaha atau mencari pekerjaan. Selain itu, banyak pengemis yang tidak memiliki modal atau akses ke pasar kerja yang layak, sehingga keterampilan yang mereka pelajari tidak dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Pegawai Dinas Sosial mengakui bahwa program ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan dana dan tenaga pendamping. Selain itu, sulit untuk mengubah pola pikir pengemis yang sudah terbiasa hidup di jalan. Banyak dari mereka yang kembali mengemis meskipun sudah ikut pelatihan, karena merasa hasil dari pelatihan tidak cukup menjamin kebutuhan hidup mereka. Namun demikian, program ini tetap memberikan dampak positif. Ada beberapa pengemis yang berhasil berubah dan kini bekerja secara mandiri, meskipun jumlahnya belum banyak. Ini menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi untuk berhasil, asalkan dilakukan secara berkelanjutan dan dengan pendekatan yang lebih intensif.

Secara keseluruhan, program rehabilitasi sosial ini sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif. Diperlukan perbaikan dalam pelaksanaannya, terutama dari segi fasilitas, pendanaan, dan strategi pendekatan kepada para peserta. Pendekatan yang lebih personal dan dukungan lanjutan setelah pelatihan bisa membantu pengemis beradaptasi dan membangun kehidupan yang lebih baik di luar jalanan.

BAB V

KESIMPULAN

Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya masih menghadapi berbagai kendala dalam pencapaiannya. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pengemis, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, pengemis musiman yang sulit dijangkau, serta kesulitan dalam reintegrasi sosial menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan juga belum sepenuhnya efektif karena terbatasnya kesempatan kerja dan dukungan pasca-rehabilitasi.

Untuk meningkatkan efektivitas program ini, diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek: Peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi agar dapat menampung lebih banyak peserta. Peningkatan jumlah dan kualitas pendamping sosial untuk memberikan bimbingan yang lebih intensif dan personal. Pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup dukungan psikososial yang berkelanjutan agar pengemis dapat beradaptasi dengan kehidupan normal. Program pemberdayaan ekonomi yang lebih kuat dan akses yang lebih luas ke pekerjaan atau modal usaha untuk memastikan pengemis dapat hidup mandiri setelah rehabilitasi. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, program rehabilitasi sosial berpotensi memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pengemis di Kota Palangka Raya dan membantu mereka keluar dari kehidupan di jalan secara permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2018). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya. (2023). *Statistik sosial Kota Palangka Raya 2023*. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya.
- Dinas Sosial Kota Palangka Raya. (2024). *Laporan tahunan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- Hidayat, A., & Siregar, A. (2022). Pemberdayaan sosial gelandangan dan pengemis di perkotaan: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 45(2), 123-136.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Dasar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraini, L., & Prasetyo, D. (2021). “Strategi Penanganan Pengemis Melalui Rehabilitasi Sosial.” *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 19(2), 87–98.
- Prasetyo, E. (2021). Reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis melalui program rehabilitasi: Perspektif sosial dan ekonomi. *Jurnal Sosial Indonesia*, 40(4), 98-113.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang *Penanganan Gelandangan dan Pengemis*.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang *Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (SNRS)*.
- Rahmawati, F. (2016). “Dampak Program Pembinaan Sosial terhadap Perubahan Perilaku Pengemis.” *Jurnal Pengembangan Sosial*, 8(2), 101–110.
- Rohmah, L., & Haryanto, B. (2022). Keterbatasan program pemberdayaan ekonomi pada gelandangan dan pengemis di perkotaan: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 29(2), 150-165.

Santoso, A. (2020). “Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial di Kota Surabaya.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 45–56.

Soeprapto, T., & Widodo, S. (2020). *Rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Indonesia: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yuliana, S. (2022). *Kebijakan Sosial: Analisis dan Implementasi Program Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.

